

KONSEPSI PEMIKIRAN ISLAM DAN DEMOKRASI MENURT ABDURAHMAN WAHID

Oleh : Hartono

Dosen Syariah STAI Sangatta

Email: hr_anton85@yahoo.co.id

Abstract

Reading the thoughts of Abdurrahman Wahid or Gus Dur, each of us will be invited to enter such a *large-visionary* space. However, at least reading Gus Dur can be seen in Indonesian-ness (Democracy), Islam and Humanity. Islam and democracy still according to him are also competent to interact with each other so as to be able to realize a democratic *democracy rather* than merely *procedural democracy*.

Dissecting the discourse of Islam and democracy certainly cannot be separated from the stage of political, state, power and government struggles on the one hand, and the relationship between Islam and other entities outside of Islam, on the other hand. The intended Islam is not a single and shared basis of values and teachings. Islam can only be seen and felt from the expressions of its adherents. Precisely because Islam can only be seen and felt from the expressions of its adherents, then Islam too is sure to have many faces. If Islam has many faces, then the political expression of Islam, of course, is very diverse. Islam is sometimes in line with democracy, but sometimes it is also opposite. At least, this is an important point and a lesson that we can take after examining books whose themes touch each other, although it cannot be said to be exactly the plot of the story and its contents.

Keyword : Abdurrahman Wahid, democracy rather, and procedural democracy

A. Pendahuluan

Membedah wacana Islam dan demokrasi tentu saja tidak bisa lepas dari panggung pergulatan politik, negara, kekuasaan, dan pemerintahan di satu sisi, serta relasi antara Islam dengan entitas lain di luar Islam, pada sisi yang lain. Islam yang dimaksudkan bukanlah sebuah basis nilai dan ajaran yang sama dan tunggal. Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya. Justeru karena Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya, maka Islam pun sudah pasti berwajah banyak. Jika Islam berwajah banyak, maka ekspresi politik Islam pun, tentu saja, amat beragam. Islam kadang sejalan dengan demokrasi, tapi kadang juga berseberangan. Setidaknya, inilah poin penting dan pelajaran yang bisa kita ambil setelah menelaah buku-buku yang temanya saling bersentuhan, meskipun tidak bisa dikatakan sama persis alur bercerita dan isinya.¹

Dilihat basis empiriknya, agama dan demokrasi memang berbeda, seperti yang sering diungkapkan oleh Abdurahman Wahid (yang kemudian disebut Gus Dur dalam penulisan paper ini), menurut Gus Dur Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia, dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri dan demokrasi pun demikian. Namun dalam relasi pola pemikiran senyatanya tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi, dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: *syura*, *musawah*, *'adalah*, *amanah*, *masuliyah* dan *hurriyyah*.²

Dalam perkembangan selanjutnya tema Islam dan demokrasi³ seolah berkompetisi dan bersaia dalam wailayah yang berbeda namun kecenderungan untuk membela rakyat⁴ belum sepenuhnya terlihat, dari fakta itu dalam dimensi lain banyak kalangan pula yang membenturkan dengan sengaja kedua tema yang ada tersebut dalam pendekatan politis, sehingga penyusun memiliki kesimpulan awal bahwa Islam tidak bisa diperbandingkan dengan demokrasi, karena Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah sedangkan demokrasi adalah sebuah produk pemikiran.

Dari perbedaan pemahaman di atas tentunya perlu adanya sebuah klarifikasi serta pemahaman yang sifatnya konferhensif tentang Islam dan demokrasi itu sendiri, dalam sistem pemerintahan atau negara Islam memiliki konsep tentang *kekhalfahan* sebagai mana yang pernah

¹ Robert W. Hefner, *Islam dan Demokrasi*, Jurnal Perta, Pendidikan Tinggi Agama Islam, [Vol. VI/No. 02/2003](#), hlm. utama

² Syamsul Hadi, *Islam dan Demokrasi*, dalam Jurnal Studi Agama dan Budaya Manarul Qur'an, Nomor: 09 Tahun VII, Januari – Maret 2012 ISSN: 1412-7075, P4 Unsiq Wonosobo, 2012 hlm. 59

³ M. As. Hikam, Mulyana W kusuma *et.al Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 98.

⁴ Hasyim Muzadi, "dalam pidato politiknya NU masih ditunggangi kepentingan partai politik" ia meyebutkan konsep demokrasi *dari rakyat, oleh rakyat* sudah dijalankan sepenuhnya namun konsep *untuk rakyat* hingga hari ini belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh rakyat baik itu berupa apa yang dilakukan oleh partai politik maupun anggota dewan sebagai penyambung lidah rakyat, dan inilah politik di Indonesia yang masing belum menunjukan sebuah progress untuk kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Harlah NU ke 28 di Stadion Glora Bung Karno, Jawapos, 3 Februari 2008.

dijalankan pada masa khalifaur rasyidun, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan dinasti Utsmani, jika konsep ini yang diperbandingkan dengan konsep demokrasi yang ada saat ini untuk mencari sebuah tatanan, pemimpin, titik temu, konsep yang lebih baik, dan sebagainya tentu ada relevansinya, dalam topik yang cukup menarik ini, penyusun ingin memetakan mencoba memetakan isu Islam dan demokrasi⁵ yang saat ini, dan untuk bisa memahami keduanya perlu pulalah sekiranya sebuah analisa tentang beberapa hal dibawah ini;

B. Pemikiran Politik Islam

Kajian Pemikiran Politik Islam membahas mengenai filsafat sains, manusia dan masyarakat politik, sistem politik, perkembangan dan kebijaksanaan politik serta proses pembuatannya, menurut perspektif Islam. Selanjutnya dikembangkan bagi studi Hubungan Internasional yang hirau terhadap pemikiran politik perspektif “*non western*”.

Dengan konsep Khilafah yang digali dari sumber-sumber pengetahuan Islam, lebih khusus Politik Islam, maka tentunya khilafah tidak akan terlepas dalam pembahasan Pemikiran Politik Islam. Dapat dikatakan bahwa membahas Pemikiran Politik Islam tanpa membahas khilafah bagaikan membahas Matahari tanpa membahas panas. Namun, disini penting untuk memisahkan pembahasan khilafah sebagai wacana historis dan wacana konseptual. Sebagai wacana historis, maka khilafah adalah sejarah masa lalu. Sebagai wacana konseptual, maka khilafah adalah realitas konsep yang dapat diperdebatkan, dibandingkan, dan mungkin diperjuangkan untuk dimunculkan kembali seperti apa yang selama ini diusung oleh Hizbut Tahrir. Sebagai konsep yang dinilai ideal, tentu hal ini patut diberikan apresiasi.

C. Ralasi Islam dan Negara

Perdebatan dan pemahaman relasi antara Islam dan negara sebenarnya sudah terjadi sejak lama yakni abad pertengahan dimasa kejayaan sistem kekhalifahan, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa pemikir besar seperti al-Mawardi, Ibn Taimiyah dan juga Ibn Khaldun dengan teorin ashobiyahnya⁶, dari ketiga tokoh ini setidaknya mereka sepakat memposisikan Islam sebagai *adin wa dawlah* namun dengan berbagai pendekatan yang berbeda-beda tentunya.

Sedangkan pengembangan-pengembangan pemikiran antara agama dan negara baik relasinya⁷ atau hubungan⁸ mengenai Islam (sebagai agama) dengan negara⁹ untuk menuju sebuah

⁵ Muntoha, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Haram “Golput”* dalam “Timbangan” Hukum Islam dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 68

⁶ Ibn Khaldun, *Muqadimah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, terj. Ahmadie Thoha), hlm. 71.

⁷ Arifin, *Relasi Islam dan Negara Setudi atas pemikiran Sahrur*, Sahrur melihat relasi islam dan negara pada tiga pokok pemikiran pertama, ritual keagamaan, kedua kode etik, ketiga legislasi, dari ketiga ini Sahrus mencoba mengintegratif antara ketiganya, karena bagi beliau walaupun agama dan negara dipisahkan namun ada titik temu yang harus di ketemukan karena sudah menjadi konsekuensi logis untuk disatukan. Jurusan Jinayah Siyasah Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, Sekripsi Tidak di terbitkan. hlm. 123.

⁸ Muhammad Idris, *Relasi Islam dan Negara (Tinjauan atas pemikiran politik Abdul Khar Mudzakkar)*, Kahar pemikirannya hamper sama dengan pemikiran tokoh kontemporer saat ini seperti Gus Dur, Cak Nur dan Juga Buya Safi’I, menurut beliau islam tidak mengenal adanya sistem pemerintahan namun lebih pada konsep teokrasi yang mengatasnamakan Tuhan, dengan sistem pemisahan ini muncul sebuah sintesa yaitu munculnya teo-demokrasi yaitu penggabungan antara hukum tuhan dengan kemauan manusia (paliti-negara) sebagai penggemban amanat Tuhan

demokrasi, sudah banyak sekali tulisan-tulisan yang tersaji, akan tetapi tema ini selalu menjadi topik yang menarik untuk selalu dibahas, disajikan perdebatan negara Islam yang selalu menjadi topik aktual mulai dari awal pembentukan ideologi bangsa¹⁰ ini hingga hari ini, selain itu isu-isu negara Islam inipun selalu digaungkan oleh kalangan HTI, MMI dengan melihat bukti empiris bahwa demokrasi sesungguhnya tidak bisa menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang sesungguhnya oleh karenanya perlu adanya sebuah sistem yang baru yakni sistem kekhilafahan yang berdasarkan syariat Islam¹¹ (*syiasah diniyah*), selain itu merekapun menolak sistem demokrasi yang dianggap pesanan serta menjadi kaki tangan Negara-negara Komunis, kapitalis serta Zionis Internasional,¹² sekliupun namanya berbeda namun hakekatnya sama.

D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Melihat budaya dan keanekaragaman suku bangsa di Indonesia ini, semuanya memiliki semangat demokrasi, rasa persatuan kesatuan (*behenika tunggal ika*)¹³, gotong-royong yang tinggi, dan selalu menjunjung harga diri bangsa ini, warisan atau budaya seperti ini sudah seharusnya dipelihara dan dibudayakan selalu demi menemukan sebuah jatidiri sebagai bangsa yang majemuk, toleran, saling menghormati dan lain sebagainya.

Sebelum merdeka pada hakekatnya benih-benih semangat demokrasi telah ada sejak lama, sejarah pergerakan mahasiswa tidak bisa dilepas dari kondisi sosial suatu bangsa seperti perjuangan negara Indonesia menuju demokrasi ini, dimana setiap priodesasi mahasiswa dengan moral *farve-nya* telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dengan ikut menentukan format terhadap Bangsa. Diawali dengan lahirnya Boedi Oetomo tahun 1908, yang dilanjutkan dengan kongres

yang hidup di bumi ini. Jurusan Jinayah Siyasah Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, Sekripsi Tidak di terbitkan. hlm. 105.

⁹ Haryono, *Konsep Negara menurut M Hatta dan M Natsir*, Hatta berpandangan bahwa dalam masalah keduniawian islam tidak memberikan penjelasan secara terperinci, detail dan sistematis termasuk masalah yang terkait dengan urusan politik dan disinilah akal manusia memiliki tempat untuk bedialktika dan untuk bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk menterjemahkan tek (agama) yang bersifat ajeg dan universal dalam kontek kehidupan praksis dan kontekstual yang selalu dinamis. Lebih jauh lagi Hatta menegaskan bahwa islam hanya sebagai panduan hidup secara substantif dan kontekstual, sedangkan Natsir lebih condong penggabungan antara agama dan negara. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, Sekripsi Tidak di terbitkan. hlm. 149.

¹⁰ Ahmad Yani Anshori *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*. (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008). hlm. 67.

¹¹ Lihat pendapat Ibn Khaldun tentang pemaknaan syariat Islam, ia mengatakan Negara harus berdasarkan syariat Islam karena akan menjamin keberlangsungan kehidupan dunia dan akhirat, akan tetapi dalam penerapannya ia lebih cenderung mengedepankan sisi moral dan nilainya dari pada pemahaman tektualnya, *Muqadimah*, hlm. 289.

¹² Sa'duddin As-Sayyid Shalih, *Jaringan Konspirasi Menentang Islam*, terj. Muhammad Thalib, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2000), hlm. 166

¹³ Pancasila bertolak dari gagasan Bhinneka Tunggal Ika, yakni keragaman dalam persatuan sebagai ciri masyarakat Indonesia. Menurut Dyenis Lombart, Indonesia di bangun dalam geologi kebudayaan berlapis-lapis yang menghasilkan masyarakat yang plural dan multicultural yang di dalamnya sekaligus mengandung potensi konflik, karena itu harus ada idiologi yang mampu mengendalikannya, yaitu pluralisme. Dan Pancasila juga di bangun berdasarkan geologi kebudayaan sejak agama Buddha, Hindu, Islam, Konghucu, dan Kristen. Maka, Pancasila juga Merupakan jawaban terhadap tantangan masyarakat yang makin kompleks dan majmuk dewasa ini. M. Dawam Rahardjo, "Pancasila, Mitos dan Rialitas", (*Kompas*, Minggu 1 Juni 2007).

mahasiswa Indonesia sehingga merumuskan Sumpah Pemuda 28 oktober 1928, semua itu merupakan format tentang untuk Bangsa¹⁴.

Adalah Muhammadiyah yang lahir tahun 1912 dan Nahdatul Ulama' tahun 1926 atau yang lainnya, tercatat pada awal pemilu tahun 1955 NU yang terjun dalam kancah perpolitikan nasional bisa mendapatkan hati masyarakat dengan memperoleh 45 kursi di parlemen dan tiga menteri¹⁵, ini semua terjadi didasarkan kesadaran para tokoh NU ketika itu untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang demokrasi walaupun NU sendiri akhirnya terjebak dalam urusan politik yang cukup melelahkan beberapa dekade namun NU akhirnya keluar dari organisasi politik menjadi organisasi keagamaan sesuai khittah NU tahun 1926 yang di cetuskan KH. Hasyim Asyari. dilain hal Muhammadiyah yang selalu terus konsisten pada pergerakan serta semangat keislaman yang diajarkan K. H. Ahmad Dahlan, dalam dua organisasi keislaman ini di dalamnya dapat diketemukan sebuah semangat antara lain semangat kemerdekaan dan semangat kebebasan berpikir.

Dalam konteks ini ajaran Islam tidak mengkekang pemeluknya untuk berpikir mengenai politik, budaya, pendidikan, ekonomi atau bahkan agama itu sendiri karena ada sebuah kebebasan berpikir yang menjadi dasar yang sangat filosofis dalam diri manusia, andaikan kebebasan berpikir/berijtihad saja dibatasi bisa dimungkinkan organisasi keislaman seperti diatas tidak akan pernah muncul hingga saat ini.

Dalam perjalanannya hingga saat ini kedua organisasi keislaman tersebut menjelma menjadi organisasi keislaman yang modern, memiliki semangat nasionalis, pluralis, inklusif dan tentunya semangat demokrasi seperti yang dicontohkan Gus Dur (beliau adalah salah satu tokoh yang pernah menjadi ketua umum PB NU), beliau sangat konsen serta respek sekali dengan semangat demokrasi di Indonesia demi menciptakan tatanan kehidupan yang adil, adanya kepastian hukum, makmur, sejahtera.

Ketika dekade 80-an menjelang berakhir negara-negara komunis mengalami *korosi* kekuasaan karena adanya penindasan terhadap rakyat yang dilakukan oleh elite-elite penguasa, yang pada akhirnya rakyat berontak sehingga ketika itu gelombang demokrasi dunia menjadi tak tertahankan dengan menumbangkan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik.

Semangat inipun sudah ada sejak dahulu di bumi Indonesia untuk menumbangkan pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang demokratis, melihat catatan sejarah di Indonesia ketika tahun 65 demonstrasi mahasiswa tak terbendung hingga turunnya rezim orla dan kenyataan inipun terulang kembali tahun 98 dengan menumbangkan rezim orba, dengan tumbangnya orba semangat reformasi menuju negara yang demokrasi, keadilan rakyat, kepastian hukum, pemerataan ekonomi, pendidikan selalu digaungkan dimana-mana. Namun semangat reformasi hingga saat ini belum menemukan jatidiriya dan keberhasilan yang sepuhnya.

¹⁴. Sutami, "Mahasiswa Pegawai Demokrasi" (*Pontianak Post*, Kamis 6 Desember 2007).

¹⁵. *Ibid.*, hlm.59

Di lain hal demokrasi di Indonesia pada saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dibanding era Orla dan Orba dahulu, saat ini kebebasan press (yang merupakan instrumen politik demokrasi), menyampaikan pendapat, berpolitik, berkarya, bahkan sampai beragapapun diberikan kebebasan dalam konteks keagamaannya sendiri”¹⁶, kenyataan ini merupakan buah manis dari perjuangan menuju demokrasi yang seutuhnya, namun walaupun begitu demokrasi tak semudah yang dibayangkan, demokrasi mahal¹⁷ penuh perjuangan dan harus dimulai dari lingkup terkecil dari diri sendiri.

Demokrasi juga merupakan proses pembelajaran yang cukup panjang yang mana demokrasi itu sendiri bukan sekedar demokrasi politik saja melainkan di dalamnya ada sebuah keadilan politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya atau dalam bahasa Amien Rais, demokrasi adalah sebuah keadilan multidimensional.

Akhir-akhir ini banyak tokoh dan para akademisi seperti Amien Rais (*pemerintah yang pro pada dunia barat*), Gus Dur (*pemerintahan yang tidak memiliki visi kedepan*), A. Syafi'i Ma'arif (*pemimpin rabun ayam, pembusukan politik, politik mata pencarian*)¹⁸ menilai pemerintahan yang di bawa Susilo Bambang Yudoyono tidak berhasil sama sekali untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pernyataan dan kenyataan ini tidak bisa dipungkiri, karena kalau dilihat senyatanya pemerintahan sekarang belum bisa memberikan perubahan yang cukup signifikan, pengangguran ada dimana-mana, kemiskinan menjadi pemandangan setiap hari, kerusakan hutan tak terelakan, kekayaan alam di sedot oleh dunia barat, dan berbagai kebijakan yang tidak bepihak kepada rakyat kecil, semua itu bisa jadi disebabkan tidak mampu dan para elite pemerintah pun sibuk dengan urusan politik golongan tanpa mau memperdulikan mereka dipilih oleh siapa, masyarakat hanya dijadikan kamufase semata. hal senada pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Masykur Moesa dalam diskusi “Kinerja partai politik yang mengecewakan”¹⁹. Sampai hari ini kenyataan pasca reformasi 98 semangat demokrasi tentunya masih ada namun semua itu hanyalah sebuah teori di atas kertas belaka tetapi kenyataannya jauh dari semangat demokrasi seperti yang diungkapkan oleh Mahfud. MD.

E. Paradigma Pemikiran Islam dan Demokrasi (Negara)

Negara akan terasa makmur, sejahtera jika didalamnya ada sebuah aturan hukum yang sesungguhnya, *nation stat* adalah sebutan bagi negeri ini, bagi Gus Dur jika ingin mewujudkan negara

¹⁶. Abdurahman Wahid “Pemerintah Gagal Jamin Kebebasan Beragama”. Dalam kontek kebebasan agama di sini sangat menyangkan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap berbagai kekerasan yang menamakan dirinya sebagai Fron Pembela Islam, dan organisasi islam yang lainnya, karena menurut beliau kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia ini setiap penduduknya haruslah di lindungi oleh pemerintah dan pemerintah pun jangan condong ke salah satu agama yang ada, banyak kejadian anarkis, pengerusakan bahkan samapai pembantaian dengan mengatasnamakan agama tertentu yang semua itu belum tentu pula kebenarannya. Hendaknya agama sepetutnya menjadi persoalan personal, bukan pemerintah membawanya keranah agama sebagai simbolisasi dalam pemerintahan khususnya (islam) jika ini terjadi sama halnya kita merendahkan kedudukan agama itu sendiri. (*Jawapos*, Minggu 23 Desember 2007).

¹⁷. *Libat*, Amin Rais *Menyembuhkan Bangsa Yang Sakit* (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1999), hlm. 66.

¹⁸. Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. Vii-xi (pengantar).

¹⁹ *Libat Jawapos* Edisi Senin, 24 Des 2007.

yang demokrasi tentu hukum harus ditegakkan, melihat beberapa analisis terhadap tulisan dan corok pemikiran Gus Dur, dapat ditemukan lima pokok pemikiran politik Gus Dur²⁰, yakni (1) Mengembangkan khazanah lokalitas Islam klasik Indonesia, (2) Humanisme sebagai perlawanan terhadap kekerasan²¹, (3) Ide semangat kultural, (4) Ide integralisme, (5) Analisis ilmiah atas realitas dunia islam, sebelum mengkaji kelima cara berpikir Gus Dur²² di atas Gus Dur dalam melihat negara selalu memisahkan dengan agama²³. Selanjutnya untuk menguji kemapanan pemikiran Gus Dur di atas ada empat sudut pandang yang disampaikan oleh DR. Munawar Ahmad dalam disertasinya, yaitu²⁴ :

1. *Politik and Order.*

Gus Dur sangat menaruh perhatian terhadap peran kekuasaan dan penguasa baik secara setruktural maupun kultural, bagi Gus Dur kekuasaanlah yang dapat melakukan perubahan dan hanya melalui kekuasaan atau birokrasi²⁵ perubahan mendasar dapat dilakukan, dunia pesantren

²⁰ Mahfud MD, "Traktat Pemikiran Gus Dur", *Seputar Indonesia*, Rabu 20 Februari 2008.

²¹ Gus Dur berusaha untuk selalu komitmen pada pendiriannya bahwa sikap humanis dan toleran untuk menyikapi sebuah perbedaan harus terus di pilihara, (Gus Dur) menegaskan komitmennya untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas agama supaya eksis di negeri ini. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, dirinya harus menjalankan amanat UUD 1945, termasuk dalam soal ini. "Jadi, mereka harus dilindungi, termasuk Ahmadiyah" kata Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB ini, saat berdialog dengan puluhan tokoh muslim pengikut Tarekat Syatari'ah di komplek makam Syekh Burhanuddin al-Minangkabawi, Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Rabu (20/2/2008). Namun ada sebuah catatan bagi pendirian Gus Dur, beliau menghargai perbedaan namun tidak sepaham dikatakan Gus Dur, dirinya mentolerir apapun bentuk keyakinan dan model peribadatan Ahmadiyah. Namun diakuinya, dirinya tidak cocok dengan ajaran mereka karena memiliki keyakinan sendiri. "Saya tidak bakal cocok dengan Ahmadiyah. Padahal pendirinya (Achmad Djojosugito) masih saudara kakek saya," katanya. Apa yang dilakukan cucu pendiri NU KH. M. Hasyim Asyari, ini tak lain hanyalah menjalankan prinsip UUD 1945. <http://gusdur.net>. Akses 29 Februari 2008

²² Pemikiran Gus Dur Seperti apa yang disampaikan oleh Greg Barton bahwa pemikiran Gus Dur tak lepas dari background beliau sejak kecil, baik dari segi konisi social dimana dia hidup maupun dari segi pendidikan dan wawasan yang diperolehnya. Oleh karena itu, hamper semua pemikiran Gus Dur lebih banyak menitikberatkan bagaimana islam bisa ditampilkan secara ramah dalam kehidupan yang plural di Indonesia khususnya, tanpa adanya kontroversi sosial-keagamaan yang akan mengakibatkan pepecahan, peperangan dan pemusuhan antara anggota masyarakat yang berbeda agama. M. Misbah, IBDA' Jurnal Studi Islam dan Budaya, ISSN : 1693-6736. Volume 3, No. 1 Januari-Juni 2005. hlm. 51.

²³ Matori Abdul Djalil, *Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa*, dalam pengantar buku ini Gus Dur mencoba mencari sintesa anatara agama-negara, karena bagi Gus Dur melihat agama-negara ada dua sudut pandang di negri ini, *pertama* ada yang menginginkan suatu agama menjadi sebuah referensi baik secara langsung yang utama (atau diutamakan) dalam membentuk sebuah negara. *kedua* tidak ada keinginan seperi yang pertama namun agama hanya menjadi sebuah referensi dalam membentuk negara dan kedudukannya ia sama dengan factor-faktor yang lain. Maka Gus Dur lebih cenderung kepada pendapat kedua bahwa agama tidak lah seharusnya di utamakan diantara agama yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan demikian penentuan perbedaan ini sangat penting karena jika agama dijadikan dasar sebuah Negara maka secara tidak langsung tidak ada pengistimewaan atas sebuah agama di atas agama-agama yang ada, karena itu tidak ada agama yang di anaktirikan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun agama itu mayoritas. (Jakarta: PT. Grasindo, 99), hlm. Xiii-xiv.

²⁴ Munawar Ahmad, *Membaca Indonesia Melalui Gus Dur Kristalisasi Pemikiran Politik Gus Dur Bagi Situasi Indonesia*, Makalah ini merupakan kutipan dari Bab IV disertasi penulis, disajikan dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh BEM Sosiologi Agama, Fak, Usuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 februari 2008.

²⁵ Feisal Tamin, "Reformasi Birokrasi Pekerjaan Sulit", dalam pandangan beliau, suatu kebijakan akan sangatlah sulit di ambil bila orang dalam birokrasi kekuasaan masih memiliki mental yang tidak sehat, selain itu juga menurut beliau agar berhasil, diperlukan tidak hanya biaya yang besar, tetapi juga komitmen yang tinggi dari para

secara kulturallah yang meletakkan pemahaman bahwa kekuasaan menjadi sebuah tatanan, bagi Gus Dur pesantren merupakan prototipe sebuah negara dan kiyai merupakan pemilik otoritas tertinggi²⁶ dalam perubahan pesantren (bagi santri ataupun aturannya²⁷) dan di dalam pesantren terbentuk pula politik spiritual, pemersatu, silatirrahi seperti Istighasah²⁸, kesadaran politik tersebut, menjadi bekal untuk memahami pola kekuasaan di dalam sekup yang lebih luas, yakni negara.

Namun Gus Dur juga menyadari bahwa situasi negara tidaklah sama dengan dunia pesantren, selain karena karakter kekuasaan yang regulative-tersebar, juga karena kekompleksan persoalan negara yakni lebih besar dan kompleks dibanding pesantren, disamping itu juga unsure-unsur pembentukan Negara sangat kompleks, beragam dan plural, situasi ini merupakan fakta dan tidak bisa dipungkiri, sehingga Gus Dur sadar bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam negara harus dihargai dan diberikan hak yang sama dalam advokasi politiknya, maka Gus Dur memilih mekanisme demokrasi sebagai jalan yang terbaik diantara yang terburuk.

pemimpin, dan pelaksanaannya menuntut adanya koordinasi yang efektif antara lembaga eksekutif, legislatif, dan masyarakat, *Gatra* 29 Juli 2004.

²⁶ Abdul Djamil, *Pesantren dan Kebudayaan*, Kajian ulang tentang peran pesantren sebagai pembentuk kebudayaan Indonesia, dalam penelitian ini pesantren merupakan tempat tradisi berkembang walaupun dalam pesantren sendiri sudah ada tradisi secara turun temurun, dan dalam dunia pesantren ada sebuah kearifan local atau tumbuhnya nilai-nilai yang tekadang tidak bisa didapatkan diluar pesantren, selain itu yang lebih dominant dalam dunia pesantren adalah ritme kehidupan pesantren di pegang mutlak oleh seorang pemimpinnya atau pengasuhnya. proyek penelitian IAIN Wali Songo Semarang 1998/1999, hlm. 155

²⁷ Mastuki HS, *Mobilitas Sosial Kaum Santri*, tulisan ini merupakan kajian Mastuki dalam disertasinya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, beliau melihat sebuah kebangkitan dalam dunia pesantren yang diawali tahun 80-an dengan masuknya kalangan menengah yaitu santri ke dunia kampus, dengan itu tentu mengakibatkan intelektualisasi massif di kalangan kaum santri dan dengan segera menjadi katalisator bagi terjadinya *intelktual bombing* di kalangan santri, dengan kemajuan yang diraih seorang santri yang identik dengan *sarungan* saat ini tentu santri akan tidak di pandang sebelah mata oleh kalangan diluar, maka tak mengherankan seorang tokoh Gus Dur juga sangat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap dunia pesantren dengan menganalogikan bahwa konsep sebuah Negara pada hakekatnya tak jauh berbeda dengan dunia pesantren. *Tempo*, Edisi 25 Februari-2 Maret 2008.

²⁸ Boedi Abdullah, *Istighatsah dalam Masyarakat Muslimin Nabhdlatul Ulama (kajian Sosiologis-Antropologis pada masyarakat nabhdiyin Jawa Barat)* Boedi dalam disertasinya pomsosi doktornya melihat Istighatsah bisa Berdemensi Spiritual dan Politis, hal ini dalam perpolitikan Indonesia saat ini sangat kental sekali apalagi warga Nadliyin cukup banyak. Boedi menyebutkan Istighatsah bisa dilihat dalam tiga dimensi *pertama Spritual* dengan melihat banyaknya jama'ah yang ikut Istighatsah biasanya memiliki tingkat kehususan yang berbeda dan dipengaruhi oleh emosi peserta Istighatsah, kecocokan situasi, lembaga-lembaga yang digunakan, permohonan do'a dan juga performance pemimpin Istighatsah *kedua ritual* sebagai upaya atau metode komunikasi antara hamba dengan tuhan. *ketiga social-politik* untuk menumbuhkan solidaritas dalam sopol, menjadi media silaturrahi yang efektif dan pembimbing terciptanya suatu cita-cita secara kolektif, namun dari tujuan itu semua nilai-nilai moral, etika, tuntunan wahyu yang bersumber dari ajaran agama (islam) bisa disesuaikan dengan tempat dan waktu sesuai dengan tuntutan global saat ini. "News Sunan Kalijaga", ISSN: 1907-17 1X, Edisi IV No. 17 / September-Oktober 2007, hlm. 4.

Bagi Gus Dur pula penghargaan yang tinggi terhadap humanisme dan toleransi²⁹ menjadi alasan Gus Dur untuk menunjukkan apresiasinya terhadap liberalisme karena liberalisme adalah filsafat hidup yang mementingkan hak-hak dasar manusia (dalam Islam ada maqosidussariah yaitu manusia hidup harus melindungi keselamatan fisik, keberagaman, keselamatan keluarga/keturunan, keselamatan harta benda dan keselamatan profesi) atas kehidupan, karena dengan kebebasan yang dimiliki manusia manusia dapat mengapresiasi dalam hal yang inofatif dan positif namun dalam hal ini Gus Dur tetap memegang aturan dan norma dengan tanpa harus mengformalkan maqosidussariah³⁰ (diambil lebih pada nilai yang terkandung).

2. *Politics and Freedom.*

Dalam sebuah negara, penghargaan tertinggi Gus Dur terletak pada kebebasan advokasi (mengemukakan pendapat, pers dll) dan ekspresi politik (berserikat, mendirikan partai) karena kebebasan tersebut dilandasi oleh citra kemanusiaan (*humanisme*) tidak aniaya dan anarkis, sudah bisa dipastikan semangat demokrasi akan terwujud. Dan sistem demokrasi yang digunakan oleh suatu negara tentu sangat menjamin manusia untuk mengekspresikan pilihan dan kehendak politiknya secara bertanggung jawab termasuk untuk tidak memilih didalam pemilu³¹ atau golput.

3. *Politics Happiness and Welfare.*

Adanya Negara tentu terlebih dahulu adanya wilayah dan rayat sehingga terbentuklah sebuah negara, dan bagi Gus Dur kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari negara. Struktur negara merupakan perangkat politik guna mendistribusikan kesejahteraan secara meluas tidak dimakan oleh pendistributornya, kesejahteraan yang dimaksud disini adalah upaya menjaga dan menyediakan sesuatu yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia secara mendasar atau dengan kata lain mampukah negara dengan sistem demokrasinya menjamin masyarakat miskin³². Di lain hal rakyat tentu punya peranan yang penting untuk ikut membentuk sebuah

²⁹ Abdurrahman Wahid, "Gus Dur dan Tokoh Agama Tolak Toleransi Diskriminatif", *Jawapos* Rabu, 13 Juni 2007.

³⁰ Yayuk Maftuhah, *Relasi Islam dan Negara Islam dalam Persepektif Majelis Mujahidin Indonesia*, kalangan Majelis Mujahidin Indonesia yang di ketuai oleh Abu Bakar Ba'asyir berpandangan bahwa Maqosidussariah harus ditegakkan di bumi Indonesia saat ini, karena fungsi sariah adalah mengayomi, menjamin keselamatan serta kesejahteraan bagi umat manusia. Pernyataan seperti ini tentu terasa bertolak belakang dengan pemahaman Gus Dur dan Buya Saif'i yang mengajarkan bahwa Indonesia bukan negara Islam namun negara republik jadi secara konstitusional hukum Islam tidak bisa diformalkan, kecuali Indonesia merubah menjadi negara islam seperti Arab Saudi, Pakistan ataupun Iran yang secara jelas menamakan negara islam yang di dalamnya menyebut secara pasti mereka mengadopsi islam sebagai ideology negaranya, hal ini tentu berbeda dengan posisi Malaysia dan Indonesia, Malaysia menyebutkan bahwa islam adalah agama resmi negaranya namun mereka bukan negara islam, lain halnya dengan Indonesia antara islam dengan negara tidak dikaitkan secara konstitusional, namun hak bagi masyarakatnya untuk melaksanakan sariat agamanya diberikan kebebasan. Jurusan Jinayah Siyasah Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, Sekripsi Tidak di terbitkan, hlm. 42.

³¹ Abdurrahman Wahid, "Peluang Demokratisasi Melalui Pemilu", <http://gusdur.net>. akses 20 Februari 2008).

³² Sunaryo Adhiatmoko, "Demokrasi Mpok Manih", *Republika*, Jumat, 16 Nopember 2007.

Negara yaitu, dengan cara tiap warga berkewajiban untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negaranya, kedua pada endingnya masyarakat memerlukan kehidupan yang layak³³.

F. Konsep Demokrasi dalam Negara menurut Abdurrahman Wahid

Gus Dur memilih mekanisme demokrasi sebagai jalan yang terbaik diantara yang terburuk dalam sebuah tatanan bernegara³⁴, dalam pandangan Gus Dur, demokrasi tidak hanya suatu sistem yang mampu menjamin kebebasan advokasi saja, namun juga memiliki nuansa etis yang mampu menjaga lahirnya keadilan tanpa kekerasan³⁵, hal tersebut terjadi karena mekanisme demokrasi membuka ruang untuk saling berdialog yang seimbang dan sejajar dari semua pihak, walaupun pada akhirnya terkadang tidak terjadi kesepakatan, karena pada dasarnya keputusan demokrasi tidak selamanya menuju pada suatu kesepakatan atau mufakat tetapi yang lebih tinggi adalah munculnya pemahaman dan pandangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dengan tujuan memperjuangkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia atau pribumisasi demokrasi dengan kultur Indonesia, tentu yang bercirikan kombinasi yang integralistik dari berbagai entitas, seperti politik budaya, rasionalitas dan kekuatan kultural atau yang sesuai dengan kandungan Pancasila. Sejak awal Gus Dur dikenal sebagai sosok agamawan, dan tokoh bangsa yang selalu mencita-citakan membangun bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi yang keluar dari militerisme dan fundamentalis Islam³⁶.

Dalam dunia modern saat ini, demokrasi dirasa dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan dari kekuatan bangsa yang pluralis seperti Indonesia ini, dan dengan demokrasi pula keterceraiberaian arah akan menuju kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa dalam proses dialektika-dinamis secara bersama-sama dan tegaknya masyarakat sipil tentu harus adanya *role of law*.

G. Demokrasi keislaman dan keindonesiaan dalam pandangan Gus Dur

Dalam melihat demokrasi keislaman tentunya Gus Dur akan melihat nilai yang terkandung yang ada dalam demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, Gus Dur tidak ingin terjebak secara formalitas mengenai keislaman itu sendiri termasuk dalam memaknai demokrasi keislaman. Dalam Islam sangat jelas mengajarkan sebuah demokrasi dengan konsep suara atau musawarah, hal

³³ Yudianto Wahyudi, *Maqosidus Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawasea, 2007), hlm., 65.

³⁴ *Ibid*, hlm. 3.

³⁵ Abdurrahman Wahid, "Negara Hukum Ataupun Kekuasaan", Jakarta **RSCM**, 20 Juli 2005, <http://gusdur.net/negara/>. Akses 29 Februari 2008.

³⁶ Umaruddin Masdar, "Gus Dur dan Manipulasi Tradisi NU" Dalam pandangan Gus Dur, demokrasi dalam sebuah negara tidak akan bisa terwujud secara nyata jika dalam suatu Negara berkembang fundamentalisme agama dan militerisme (kekerasan secara struktural maupun kultural), pada perjalanannya jika ingin mewujudkan demokrasi akan tetapi watak kekerasan dan fundamentalisme agama masih dipelihara maka demokrasi akan terus menjauh bukan mendekat. Ada dua paradigma yang di bangun Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi di negeri ini selain konsep di atas, Gus Dur sangat apresiatif terhadap khazanah intelektual klasik walaupun beliau hidup saat ini, kedua menjadikan islam sebagai factor komplementer dalam kehidupan social dan politik, dalam factor komplementer ini Gus Dur melihat islam di jauhkan dari kecenderungan menjadi ideology politik (negara) tetapi lebih sebagai etika sosial (social ethics). *Bernas*, Jum'at, 5 Oktober 2001.

ini bisa diketemukan dalam surah Al-Imran ayat 153, dengan dasar itu tentunya Islam yang lahir 17 abad yang lalu sudah mengajarkan mengenai musawarah yang menjadi landasan demokrasi modern saat ini. Bagi Gus Dur yang konsisten dengan sikap sekulernya yaitu dengan memisahkan antara agama (Islam)³⁷ dan negara namun disisi lain Gus Dur mengajarkan demokrasi yang memiliki basis modernisasi dan keterbukaan tentu secara “frontal” akan berhadapan dengan Islam³⁸ dan bagaimana menghadapinya.

Sedangkan demokrasi keindonesiaan menurut Gus Dur sudah ada dan dimiliki oleh bangsa ini, hal ini terlihat sekali dengan pluralitas penduduknya, budayanya, adat dan agamanya, semua ini sebagai modal yang sudah ada sejak dahulu untuk membentuk demokrasi keindonesiaan yaitu demokrasi yang sesuai dengan watak dasar kepribadian dan budaya masyarakat Indonesia tanpa harus tercerabut dari akar budaya yang ada dan menjadi sebuah keharusan demokrasi itu dapat mengelola keragaman dan konflik (jangan sampai yang mayoritas menindas yang minoritas) ditengah-tengah masyarakat yang plural³⁹. Namun ironinya masyarakat saat ini belum bisa memaknai dan melihat nilai-nilai yang ada dalam budaya dan lain sebagainya yang ada di negeri ini sebagai modal untuk memperjuangkan demokrasi secara luas⁴⁰.

Gus Dur secara pribadi ataupun melalui partai yang beliau dirikan selalu memberikan contoh untuk bersikap demokrasi, terbuka, saling menghargai, kesamaan hak, kebebasan menyampaikan pendapat dan berani berbeda untuk sebuah perbedaan dengan tujuan kemakmuran, kedewasaan dan keamanan masyarakat yang ada yang semua itu sesungguhnya sudah terangkum dalam Pancasila⁴¹.

H. Kesimpulan

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai tokoh yang sangat mencintai bangsa dan negara ini tentu beliau ingin terus memperjuangkan kepentingan rakyat dari tindakan-tindakan penguasa yang tidak membela rakyat, beliau selalu ingin memerdekakan rakyat ini dengan kemerdekaan,

³⁷ Mohammad Nasiruddin Amin, Islam dan kenegaraan (studi komperasi pemikiran Abdurrahman Wahid dan M Amien Rais), sosok Gus Dur dengan tegas melihat bahwa islam pada hakekatnya dalam bentuk negara lebih cenderung berbentuk dinasti maka akhirnya system politiknya lebih cenderung mempertahankan setatus Quo, atau dalam pernyataan lainnya Gus Dur berpendapat islam sebenarnya tidak memiliki konsep pemerintahan secara defenitif, dalam hal ini contoh dalam masalah suksesi islam tidak punya panduan yang baku seperti menggunakan ihktilaf (pengangkatan Umar dari Abubakar), baiat (pembaiatan Umar oleh kaum muslimin) dan juga ahlu al-hallwa al-aqdi (formatur. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, Sekripsi Tidak di terbitkan. hlm. 57&65.

³⁸ A R. Loeibis, *Belantara Kebangsaan*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 35.

³⁹. Hasrul Hanif, *Multikulturalisme di Indonesia*, SULUH Majalah Antar Iman, ISSN: 1693-3192 / 2007, hlm. 15.

⁴⁰ Anders Uhlin, *Oposisi Berserak Arus deras Demokratisasi Gelombang ketiga di Indonesi*, para pemikir lebih suka defenisi demokrasi maksimalis, karena demokrasi yang terbatas pada demokrasi politik saja akan menyingkirkan diskusi tentang pembagian kekuasaan yang nyata dalam masyarakat sedangkan masalah, sosial, ekonomi dan juga pendidikan seolah terlupakan, pandangan yang mengarah seperti ini untuk memaknai sebuah demokrasi menurut Gus Dur sangat tidak sesuai untuk membangun demokrasi mulai dini, bagi beliau cobalah demokrasi itu dipahami dalam tataran nilai-nilai selain dalam tataran praksisnya. Selain itu manusia sebagai zome politicon menuut Sekartes hendaknya manusia itu pn harus bisa memaknai sebuah peran politiknya. (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 9.

⁴¹. Brigjen Soeharto, *Keterbukaan dalam Demokrasi Pancasila*, KAJIAN Jurnal Ilmiah, ISSN: 0215-2673 / No. 00 / November 1995, hlm. 52-53.

kesejahteraan, perdamaian serta keadilan yang seutuhnya, dan ia selalu prihatin melihat carut-marut demokrasi yang diusung pasca reformasi 98 dikala itu, saat ini semua itu seolah hanya menjadi wacana serta retorika yang dinikmati oleh sekelompok elit penguasa yang ada.

Gus Dur yang sangat *pro-demokrasi* berjuang tanpa henti untuk bisa mewujudkan pemikirannya itu, bagi beliau bagaimana demokrasi itu dapat ditegakkan dan dijalankan sebagaimana mestinya di dalam negara, karena dalam pemahaman beliau demokrasi sama halnya sebuah kemerdekaan negeri ini, namun demokrasi tidak datang begitu saja melainkan butuh perjuangan. Dengan pemikiran Gus Dur dalam konteks saat ini sangat relevan dan harus dijalankan sebagai konsep yang ideal, karena jika negara ini tidak melakukannya tentu semua kepentingan, tujuan, serta kedamaian yang diperjuangkan bangsa ini akan sia-sia.

Kedepan demokrasi-keadaban (*subtansial*) yang dicita-citakan Gus Dur menjadi PR yang akan terus diperjuangkan, demokrasi prosedural hari ini yang dapat disaksikan seolah hanya *caver* tanpa ada isi (*core*) sehingga tidak ada rambu-rambu yang disepakati dan implikasinya melahirkan pula pemimpin-pemimpin yang kerdil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Istighatsah dalam Masyarakat Muslimin Nabdlatul Ulama* “News Sunan Kalijaga”, ISSN: 1907-17 1X, Edisi IV No. 17 / Sep-Okt 2007.
- Ahmad, Munawar. *Membaca Indonesia Melalui Gus Dur Kristalisasi Pemikiran Politik Gus Dur Bagi Situasi Indonesia*, Fak, Usuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 februari 2008.
- Amin, Mohammad Nasiruddin *Islam dan Kenegaraan (setudi komperasi pemikiran Abdurrahman Wabid dan M Amien Rais)*, Jurusan PMH Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- A R. Loeibis, *Belantara Kebangsaan*, Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Arifin, *Relasi Islam dan Negara Setudi atas Pemikiran Sabrur*, Jurusan Jinayah Siyasah Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Anshori, Ahmad Yani. *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Djalil, Matori Abdul. *Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa*, Jakarta: PT. Grasindo, 99.
- Djamil, Abdul. *Pesantern dan Kebudayaan*. Proyek Penelitian IAIN Wali Songo Semarang 1998/1999.
- Ghafur, Abdul. *Pemikiran Abdurrahman Wabid Tentang Demokratisasi dan Implikasinya terhadap Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, WALISONGO, Jurnal Penelitian ISSN 0852-7172 Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Edisi 16 2001.
- Hefner, Robert W. *Islam dan Demokrasi*, Jurnal Perta, Pendidikan Tinggi Agama Islam, [Vol. VI/No. 02/2003](#), hlm. utama
- Hadi, Syamsul. *Islam dan Demokrasi*, dalam Jurnal Studi Agama dan Budaya Manarul Qur'an, Nomor: 09 Tahun VII, Januari – Maret 2012 ISSN: 1412-7075, P4 Unsiq Wonosobo, 2012.
- Hanif, Hasrul. *Multikulturalisme di Indonesia*, SULUH Majalah Antar Iman, ISSN: 1693-3192 / 2007
- Hikam, M. As. Mulyana W kusuma. *et.al Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 1999
- Haryono, *Konsep Negara menurut M Hatta dan M Natsir*, Jurusan PMH Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Ibn Khaldun, *Muqadimah*, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Idris, Muhammad. *Relasi Islam dan Negara (Tinjauan atas pemikiran politik Abdul Khar Mudzakkar)*, Jurusan Jinayah Siyasah Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Jawapos Edisi Senin, 24 Des 2007.

Muntoha, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Haram "Golput" dalam "Timbangan" Hukum Islam dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Maliki, Zainuddin. *Politikus Busuk Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. Vii-xi (pengantar).

MaHFud MD, "Traktat Pemikiran Gus Dur", *Seputar Indonesia*, Rabu 20 Februari 2008.

<http://gusdur.net>. Akses 29 Februari 2008

Misbah, M. IBDA' Jurnal Studi Islam dan Budaya, ISSN : 1693-6736. Volume 3, No. 1 Januari-Juni 2005.

Mastuki HS, *Mobilitas Sosial Kaum Santri*, tulisan ini merupakan kajian Mastuki dalam disertasinya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta *Tempo*, Edisi 25 Februari-2 Maret 2008.

Maftuhah, Yayuk. *Relasi Islam dan Negara Islam dalam Persepektif Majelis Mujahidin Indonesia*, Jurusan Jinayah Siyasah Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Masdar, Umaruddin. "Gus Dur dan Manipulasi Tradisi NU" *Bernas*, Jum'at, 5 Oktober 2001.

Muzadi, Hasyim. "dalam pidato politiknya NU masih ditunggangi kepentingan partai politik" Harlah NU ke 28 di Stadion Gora Bung Karno, *Jawapos*, 3 Februari 2008.

Rahardjo, M. Dawam. "Pancasila, Mitos dan Rialitas", (*Kompas*, Minggu 1 Juni 2007).

Rais, Amin. *Menyembuhkan Bangsa Yang Sakit* (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1999.

Shalih, Sa'duddin As-Sayyid. *Jaringan Konspirasi Menentang Islam*, terj. Muhammad Thalib, Yogyakarta: Wihdah Press, 2000.

Sutami, "Mahasiswa Pegawai Demokrasi" (*Pontianak Post*, Kamis 6 Desember 2007).

Sunaryo Adhiatmoko, "Demokrasi Mpok Manih", *Republika*, Jumat, 16 Nopember 2007.

Soeharto, *Keterbukaan dalam Demokrasi Pancasila*, KAJIAN Jurnal Ilmiah, ISSN: 0215-2673 / No. 00 / November 1995.

Tamin, Feisal "Reformasi Birokrasi Pekerjaan Sulit", , *Gatra* 29 Juli 2004.

Uhlin, Anders. *Oposisi Berserak Arus deras Demokratisasi Gelombang ketiga di Indonesi*, Bandung: Mizan, 1998.

Wahid, Abdurahman. "Pemerintah Gagal Jamin Kebebasan Beragama". (*Jawapos*, Minggu 23 Desember 2007).

-----."Peluang Demokratisasi Melalui Pemilu", <http://gusdur.net>. akses 20 Februari 2008.

-----."Gus Dur dan Tokoh Agama Tolak Toleransi Diskriminatif", *Jawapos* Rabu, 13 Juni 2007.

-----, “Negara Hukum Ataukah Kekuasaan”, Jakarta **RSCM, 20 Juli 2005**,
<http://gusdur.net/negara/>. Akses 29 Februari 2008.

Wahyudi, Yudiyan. *Maqosidus Syari’ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawasea, 2007.